

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA MANADO

Evaluation of Smart City Policy Implementation in Manado City

Stenly Beteng, Gene H. M. Kapantow, dan Pingkan P. Egam
Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah
Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of Smart City policies in Manado City. The research was carried out in January-July 2021. The data used were primary and secondary data. Primary data were obtained through in-depth interviews with informants who have a direct role in the implementation of the Manado Smart City policy. Secondary data were obtained through the study of documents and archives related to the implementation of Smart City Policies. The research variables used were taken from the results of the final evaluation of 96 programs included in the 6 dimensions of the Smart City of Manado City. The analytical method used was interactive data analysis through 4 stages, namely data collection, data reduction, data display and conclusions. For the analysis stage, it was focused on the final evaluation of the achievements of the Smart City program in Manado City.

The results showed that the compliance of the implementor in implementing the Smart City program was not completely in accordance with the objectives of the Smart City Masterplan. The six dimensions of Smart City owned by Manado City contained 96 activity programs spread across various OPDs. Out of this 96 activities, there were 28 of them that had not been realized, and there were 35 others that had not been successfully implemented according to the indicators of success. Communication was an inhibiting factor in the implementation of the Smart City policy in Manado City, while resources, disposition and bureaucratic structure were the driving factors.

Keywords: *Evaluation of Smart City Policy Implementation, Smart City Manado City*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Smart City di Kota Manado. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Juli Tahun 2021. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui Wawancara mendalam (In-depth interview) kepada narasumber yang berperan langsung dalam implementasi kebijakan Manado Smart City. Sumber data sekunder diperoleh melalui pengkajian dokumen dan arsip yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Smart City. Sementara, variabel penelitian yang digunakan yaitu evaluasi akhir dari 96 program yang masuk dalam 6 dimensi Smart City Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data interaktif Miles and Huberman yang melalui 4 tahapan yaitu data collection, data reduction, data display (data diolah menggunakan teori dari Ripley serta menilai apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan mengacu pada teori Edward III) dan conclusions. Untuk tahapan analisis, fokus pada evaluasi akhir dari pencapaian program Smart City Kota Manado.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan implementor dalam mengimplementasikan program Smart City belum cukup sesuai dengan sasaran dari Masterplan Smart City. Dari ke-6 dimensi Smart City yang dimiliki Kota Manado yang memuat 96 program kegiatan yang tersebar di berbagai OPD yaitu setidaknya

ada 28 program yang belum direalisasikan karena pandemic Covid-19, 35 program lain belum berhasil dijalankan sesuai indikator keberhasilan. Sementara, menurut teori Edward III, komunikasi menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Smart City Kota Manado. Sedangkan untuk sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor pendorong.

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi Kebijakan Smart City, Smart City Kota Manado.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut BPS tahun 2014 tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan sebesar 2,75% per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 82,37% penduduk akan tinggal di kota pada tahun 2045. Hal ini tentunya akan meningkatkan berbagai permasalahan. beragam inovasi, permasalahan yang timbul dapat dituntaskan melalui pembangunan pengembangan dan pengelolaan kota secara cerdas dengan dukungan teknologi, selanjutnya disebut kota cerdas (Smart City).

Untuk penerapannya di Indonesia, beberapa kabupaten dan kota telah mengimplementasikan kebijakan smart city, salah satunya Kota Manado yang bila ditotalikan sejak diterapkannya selang tahun 2016-2019 Kota Manado sudah berhasil mengumpulkan 57 penghargaan Smart City. Kepadatan penduduk di Kota Manado sudah pasti rentan menimbulkan persoalan seperti beberapa sudut kota Manado terlihat kumuh, adanya kriminalitas, permasalahan lingkungan, ketersediaan akses internet dan data digital, layanan informasi 1x24 jam, serta masalah lain yang berhubungan dengan tata kelola sistem smart city harus secepatnya diantisipasi. Jika dibiarkan akan menghambat kemajuan Kota Manado dan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Untuk mengatasi beragam permasalahan di Kota Manado ini, Pemerintah Kota Manado mengimplementasikan kebijakan Manado Smart City dalam pengelolaan pemerintahannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam penyusunan penelitian

ini penulis mengambil judul penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Manado'.

Kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah Keban (2008). Ada juga menurut Suaedi dan Wardiyanto (2010), berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan (Mursalim, 2017).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Smart City di Kota Manado.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Manado maupun pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap penerapan Smart City. Menjadi sumber bacaan, tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai evaluasi

implementasi kebijakan Manado Smart City.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau referensi penunjang untuk penelitian berikutnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Januari 2021-Juli 2021.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memakai sumber data primer dan data sekunder. Untuk sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (In-depth interview) kepada narasumber yang betul-betul mengetahui dan berperan langsung dalam implementasi kebijakan Manado Smart City. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen dan arsip yang berhubungan dengan Smart City Kota Manado.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (In-depth interview) kepada narasumber atau informan yang kompeten. Serta melakukan Pengkajian Dokumen dan Arsip

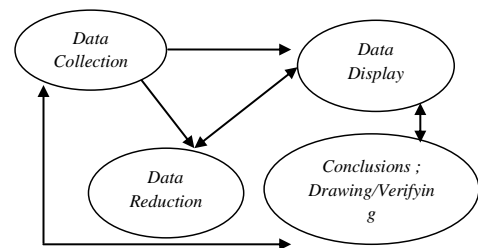
Variabel Penelitian

Pencapaian sasaran program Smart City tidak lepas dari kepatuhan implementor dalam mengimplementasikan 96 program yang tergabung dalam 6 dimensi Smart City yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Branding, Smart Society, Smart Living, dan Smart Environment. Dari 96 program Smart City ini, total yang sudah direalisasikan sebanyak 70,83% atau sebanyak 68 program

dan 28 program lainnya belum direalisasikan. Oleh sebab itu, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu 68 program yang sudah terealisasi dan 28 program yang belum terealisasi pada program kegiatan pembangunan Smart City di Kota Manado.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis data interaktif. Miles and Huberman dalam Sugiyono, (2017) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun bagannya adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Komponen analisis data interaktif Miles and Huberman (Sugiyono, 2017).

Untuk tahapan analisis fokus pada evaluasi akhir dari pencapaian program Smart City Kota Manado. Kemudian data yang diperoleh tersebut diolah menggunakan teori dari Ripley, serta menilai apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang mengacu pada teori Edward III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Implementasi *Smart City* di Kota Manado

1. Evaluasi *Output* Implementasi Kebijakan *Smart City* Kota Manado

Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Kota Manado telah mengimplementasikan program dan kegiatan *Smart City* dalam upaya mewujudkan Manado Maju dan Sejahtera. Output yang dihasilkan Implementasi Manado *Smart City* adalah:

- a. Kebijakan *Smart City*
 1. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 2. Peraturan Walikota Manado Nomor 10 Tahun 2018 tentang Manado *Smart City*.
 3. Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2019 tentang *Master Plan* Manado *Smart City*.
 4. Peraturan Walikota Manado Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

- b. Kelembagaan *Smart City*
 1. Dewan *Smart City*, melalui Keputusan Walikota Manado Nomor 117/KEP/D.09/KOMINFO/2018 tentang Dewan *Smart City* Manado.
 2. Tim Teknis *Smart City*, melalui Keputusan Walikota Manado Nomor 118/KEP/D.09/KOMINFO/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Manado *Smart City*.
- c. Anggaran *Smart City*
 Nilai anggaran *smart city* dari APBD untuk Infrastruktur IT adalah:
 1. Tahun 2018 dianggarkan 12,3 miliar dan tahun 2019 dianggarkan 15 miliar.
 2. Tahun 2020 dianggarkan 9 miliar, namun akibat Pandemi Covid-19 dilakukan *refocusing* berjumlah 3,7 miliar sehingga anggaran *smart city* setelah *refocusing* menjadi 5,2 miliar.
2. Outcome Yang Dihasilkan Setelah Implementasi *Smart City*

Tabel 1. Program Implementasi Manado *Smart City*

No	Dimensi	Jumlah Program/kegiatan	Realisasi			Belum Realisasi	Persentasi Realisasi
			2019	2020	Total		
1	<i>Smart Governance</i>	25	18	2	20	5	80%
2	<i>Smart Economy</i>	14	9	2	11	3	78,57%
3	<i>Smart Branding</i>	7	3	2	5	2	71,43%
4	<i>Smart Society</i>	23	9	4	13	10	56,52%
5	<i>Smart Living</i>	16	7	2	9	7	56,25%
6	<i>Smart Environment</i>	11	9	1	10	1	90,91%
	Total	96	55	13	68	28	70,83%

Dari Tabel 1, terkait program implementasi Manado *Smart City* dapat dilihat bahwa masih ada 28 program kegiatan yang belum direalisasikan. Sementara untuk 68 program lainnya sudah terlaksana dengan total presentasi realisasi 70,73%.

“Pemerintah Kota Manado dalam menuntaskan program kegiatan *Smart City*

masih terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. Sejak Maret tahun 2020 banyak anggaran kegiatan sudah dialihkan ke penanganan Covid-19. Sebab itu, sampai saat ini masih banyak program kegiatan *Smart City* yang belum terakomodir”. (Wawancara 12 Mei 2021).

Mengenai 68 program Smart City yang telah direalisasikan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Smart Branding

Dari ke lima program kegiatan pada dimensi Smart Branding yang telah direalisasikan, empat diantaranya yaitu aplikasi Manado 360, fasilitas akses internet di lokasi wisata, e-marketplace untuk koperasi dan UMKM, serta portal koperasi dan UKM, sesuai indikator keberhasilan ke-4 program tersebut tidak berhasil dalam implementasi pelaksanaannya. Selain tidak adanya ketersediaan anggaran, ego sektoral lintas OPD menjadi faktor lain gagalnya program yang sudah direalisasikan. Sementara, satu program yang memenuhi indikator keberhasilan yakni kegiatan Manado Fiesta. Sehingga, sasaran program pada dimensi Smart Branding yang sudah ditetapkan yaitu untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional belum tercapai. Sehingga, kepatuhan implementor dalam menjalankan program dan kebijakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Smart Economy

Pada dimensi Smart Economy telah direalisasikan sebanyak 11 program Smart City, 3 diantaranya tidak berjalan dengan baik sesuai indikator keberhasilan dari program itu sendiri seperti sistem informasi pelayanan dan ketenagakerjaan terintegrasi, sistem aplikasi Zona Penangkapan Ikan (ZPAN), dan pembangunan pasar tradisional yang berdaya saing. Satu program lain yaitu penyusunan konsep dan modul pelatihan akuntansi usaha koperasi setelah peneliti melakukan pengecekan lapangan ternyata program tersebut belum pernah terealisasi. Sementara, 7 program lain pada dimensi Smart Economy ini berhasil diimplementasikan sesuai dengan indikator keberhasilan masing-masing program.

Dengan begitu, sasaran program pada dimensi

Smart Economy yaitu pertumbuhan ekonomi secara umum melalui pendekatan inovasi dan kreatifitas yang berkesinambungan dengan menciptakan portal informasi dan perijinan satu pintu, sistem Informasi terpadu untuk proses distribusi barang dan jasa serta mendukung penyebaran informasi usaha terkait komoditi unggulan dapat dikatakan belum berjalan cukup baik karena masih ada 4 program yang tidak berhasil dijalankan. Sehingga, imlementor dalam hal ini cukup patuh pada kebijakan dan program yang telah direncanakan dan dijalankan.

3. Smart Environment

Pada dimensi Smart Environment direalisasikan sebanyak 10 program kegiatan, dengan 4 program diantaranya berhasil dilaksanakan sesuai dengan indikator keberhasilan program. Diantaranya motor sampah untuk membawa sampah dari tempat tinggal masyarakat ke TPS kecamatan, pembangunan taman kota dan Pemeliharaan Taman bermain, kebun bibit RTH/Taman Kota, pembangunan vertikal garden, dan road sweeper. Sementara, 6 program lainnya tidak berhasil dijalankan karena tidak implementasinya sesuai dengan indicator keberhasilan program. Dengan adanya 6 program yang tidak berjalan dengan baik pada dimensi Smart Environment, dapat dikatakan kepatuhan implementor dalam melaksanakan program kegiatan belum sepenuhnya patuh pada sasaran dan tujuan dari program yang ditetapkan. Sehingga, pencapaian sasaran program pada dimensi Smart Environment yaitu memanfaatkan TIK untuk mendukung terwujudnya kota Manado yang bersih, asri, lestari, aman, ramah lingkungan, menjamin keamanan lingkungan dari bahaya bencana alam serta mendukung terwujudnya kota Manado yang sehat tidak terlalu maksimal.

4. Smart Governance

Pada dimensi Smart Governance, telah

direalisasikan sebanyak 20 program kegiatan Smart City. Dari program yang telah dilaksanakan ini, ada 11 program yang diimplementasikan sesuai dengan indikator keberhasilan diantaranya Sistem Cerdas Kepegawaian, Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA), Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), elektronik naskah dinas (e-Gol), Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIP2T), sistem antrian database, Aplikasi Dashboard Cerdas Command Center (C3) dan Pemeliharaan Ruang Pusat Kendali, Pengelolaan Sistem Informasi Kelahiran, Penggunaan tanda tangan digital untuk pengesahan permohonan perizinan, DRC dan Colocation, serta pengadaan Videotron dan Billboar. Sementara 9 program lain dari dimensi Smart Governance tidak berhasil dijalankan sesuai dengan indikator keberhasilan. Program yang alihfungsikan ke program lain karena adanya edaran/peraturan dari pemerintah ada 2 program yaitu Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) diganti ke SIPD dan sistem elektronik naskah dinas (e-Gol) yang diganti dengan SiMaya (sistem informasi dunia maya). Sehingga, kepatuhan implementor dalam menjalankan program pada dimensi Smart Governance belum sepenuhnya patuh, karena ada 9 program yang tidak berhasil dijalankan sesuai dengan indikator keberhasilan.

5. Smart Living

Pada dimensi Smart Living program kegiatan yang direalisasikan yaitu 9 program dan hanya 3 program yang berhasil diimplementasikan sesuai dengan indikator keberhasilan. Ketiga program tersebut ialah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies, menata kawasan kumuh secara bertahap di 25 lokasi yang ada di kota manado, dan pembangunan dan pengembangan kawasan

Kota Baru (Manado Aerocity). Sementara ke-6 program lain pada Dimensi Smart Living tidak dijalankan sesuai dengan indikator keberhasilan.

Sehingga, dapat dikatakan kepatuhan implementor pada program yang ada dalam dimensi Smart Living tidak cukup patuh karena dari 9 program, hanya 3 program yang berhasil dijalankan sesuai dengan indikator keberhasilan.

6. Smart Society

Pada dimensi Smart Society telah direalisasikan sebanyak 13 program Smart City sesuai laporan tim teknis. Namun kenyataan dilapangan setelah dilakukan pengecekan, ada satu program yang belum terealisasi sama sekali yaitu program pembangunan rumah singgah untuk gepeng. Jadi dapat dikatakan program yang terealisasi pada dimensi Smart Society baru 12 program. Untuk implementasi program, dari setidaknya 12 program yang benar-benar terealisasi, ada 6 program yang dilaksanakan sesuai dengan indikator keberhasilan diantaranya Mengembangkan Sistem Cerdas ATCS (Area Traffic Control System), Membangun Sistem layanan rujukan terpadu (SLRT), Mengembangkan sistem informasi cuaca (RICCA), Mengembangkan sistem pelaporan masyarakat yang bersifat darurat, Pengembangan sistem santunan duka, PPDB Online dan UNBK, dan Penyusunan Data dan Informasi Peta Rawan Bencana. Sementara, ke-6 program lain belum diimplementasiakn sesuai dengan indikator keberhasilan. Dengan begitu, kepatuhan implementor pada dimensi Smart Society belum sepenuhnya patuh. Sehingga menyebabkan sasaran dari dimensi ini tidak tercapai maksimal.

Tabel 5. Program kegiatan *Smart City* yang belum terealisasi tahun 2021

No	Program Kerja Inovasi	Indikator Keberhasilan
<i>Smart Governance</i>		
1	Sistem Administrasi Kearsipan Berbasis Digital (E-Arsip)	Persentase dokumen atau arsip daerah dalam bentuk digital
2	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengawasan internal secara berkala - Pengaduan masyarakat dan internal - Inventarisasi temuan pengawasan - Tindak lanjut dari hasil temuan - Koordinasi pengawasan
3	Ruang data center	Tersedianya ruang data center yang representatif
4	e-Kelurahan (aplikasi <i>online</i> yang berfungsi untuk mengurus dan membuat surat kepada masyarakat yang terkoneksi Disdukcapil	Persentase administrasi masyarakat yang bisa diselesaikan
5	Pendekatan pelayanan Capil ke penduduk	Indeks kepuasan masyarakat
<i>Smart Branding</i>		
1	Pengembangan dan pemeliharaan website pemerintah yang multilingual	Persentase wisatawan domestik dan mancanegara yang mengakses informasi wisata
2	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pariwisata berbasis Android	Jumlah user yang mengunduh aplikasi
<i>Smart Economic</i>		
1	Mengembangkan Sistem Informasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Pemenuhan ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin kronis dan transien
2	Pengembangan Kawasan Rumah pangan Lestari	Persentase Jumlah Kelurahan yang melaksanakan KRPL
3	Mengembangkan usaha pengolahan pangan Lokal	Ketersediaan pangan lokal yang beranekaragam
<i>Smart Living</i>		
1	Pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota beserta Rencana Rinciannya melalui peta analog dan digital	Tersedianya peta analog dan digital RTRW dan RDTR (2018: RTRW, 2019: semua peta)
2	PU Complain Center (Pusat pengaduan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur kota)	Jumlah laporan masyarakat
3	Pengembangan, pemeliharaan, dan operasional sistem informasi kesehatan (SIK e-Health)	Jumlah puskesmas yang telah terintegrasi di SIK e-Health
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu jalan solar cell yang sudah terintegrasi dengan IoT dan LED	Persentase jumlah lampu yang terpasang lampu solar cell Persentase wilayah yang telah terpasang lampu solar cell

Tabel 5. Program kegiatan Smart City..... (sambungan)

5	Peningkatan perbaikan perumahan rakyat dan kampung kelurahan	Persentase jumlah rumah yang terlayani
6	Pembentukan dan pengembangan kampung KB	Jumlah keluarga yang ikut KB
7	Membangun fasilitas Rumah Lansia	Usia harapan hidup semakin meningkat
<i>Smart Society</i>		
1	Sistem pelaporan masyarakat (Punic Buttom)	Angka kriminalitas (terlapor) dan jumlah konflik/tawuran per tahun
2	Manado Fire Fast Calling (aplikasi meningkatkan respon dari pos ke lokasi kebakaran)	- cakupan pelayanan bencana kebakaran - tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan WMK
3	Sistem Informasi Sekolah (SIS)	Persentase akses (SIS) oleh peserta didik, orang tua, pendidik, dan tenaga kependidikan
4	Membangun aplikasi E-Youth (aplikasi yang menjadi pangkalan data pemuda) sudah termasuk pengembangan & Pemeliharaan	Jumlah pemuda yang berpotensi
5	Portal informasi kerukunan umat beragama	Jumlah konten dalam portal informasi kerukunan umat beragama
6	Portal Wawasan Kebangsaan	Jumlah konten yang ada di dalam portal dan jumlah sekolah yang diberikan edukasi wawasan kebangsaan
7	Membangun Sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	Jumlah masyarakat miskin yang masuk jaringan social
8	Membangun system informasi peringatan dini Early Warning System (Banjir dan Gempa Bumi)	Persentase informasi bencana
9	Ruang pusat kendali pendidikan berbasis TIK	Persentase jumlah sekolah dan siswa yang terpantau
10	Pembangunan diorama sejarah dan kearsipan Kota Manado yang atraktif	Tersedianya sejarah dan kearsipan kota manado
<i>Smart Environment</i>		
1	Kapal penghisap sampah di laut dan sungai	Persentase penurunan jumlah sampah di laut dan sungai

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Manado

Keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Smart City di Kota Manado tidak lepas dari berbagai faktor. Mengacu pada teori Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, dapat diketahui faktor apa saja yang

berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan Smart City.

1. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan Manado Smart City terdapat komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal meliputi rapat, monitoring dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang di adakan Pemerintah Kota Manado

melalui Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City. Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berikut ini:

“Koordinasinya berupa rapat, monitoring dan evaluasi serta bimtek yang menghadirkan masing-masing OPD terkait. Koordinasi ini dalam rangka menunjang program kegiatan Smart City”. (wawancara, 20 Juli 2021).

Komunikasi formal yang dilakukan oleh Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City ini berjalan cukup baik. Rentang waktu pelaksanaan monitoring juga cukup jelas dengan dilaksanakan setiap tiga bulanan. Selain itu, adapun komunikasi informal yang dilakukan oleh Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City dengan masyarakat Kota Manado terkait sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Dalam melakukan komunikasi informal ini, Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City maupun OPD kepada masyarakat Kota Manado sebagai kelompok sasaran kebijakan berjalan kurang baik. Hal ini terjadi karena hanya sebagian kelompok masyarakat tertentu yang mengerti adanya kebijakan Manado Smart City di Kota Manado. Namun masih banyak yang belum mengetahui dan kurang tahu secara jelas tentang adanya kebijakan Manado Smart seperti yang disampaikan pedagang di pasar tradisional Pinasungkulan :

“Saya tidak tahu pak. Untuk sosialisasi sendiri pun setahu saya tidak pernah di lingkungan pasar, di lingkungan tempat tinggal saya juga sama tidak pernah adanya sosialisasi tentang smart city”. (wawancara, 22 Juli 2021).

2. Sumber daya

Berkaitan dengan sumber daya manusia merupakan semua aktor yang berkepentingan serta ikut ambil andil dalam pelaksanaan kebijakan Manado Smart City, Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City mengalami kendala seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Kota Manado

berikut ini :

“Sumber daya manusia sendiri sebenarnya kami mengalami kekurangan, untuk ASN di Kominfo yang menguasai bidang teknologi informasi hanya 3 orang. Jadi itu kurang untuk menyelesaikan tugas yang kami kerjakan. Sebab itu, Kominfo melalui Tim Teknis melakukan rekrutmen pegawai non ASN untuk mengisi bidang programmer dan bidang teknis lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dan jaringan. Tapi secara umum, data ASN Kota Manado tahun 2018 yang berjumlah 5.722 pegawai, memiliki sumber daya pemerintah yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hanya berjumlah 57 pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kesiapan menuju pengembangan Manado Smart City perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan sumber daya di bidang TIK melalui perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berlatar belakang TIK maupun non ASN”. (wawancara, 22 Juli 2021).

Sumber daya financial adalah besaran dana atau anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Manado untuk membiayai pelaksanaan kebijakan Smart City di Kota Manado. Sumber daya financial untuk pelaksanaan kebijakan Manado Smart City bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado sesuai dengan yang tertera di dalam Masterplan Manado Smart City. Sumber daya financial dalam pelaksanaan kebijakan Manado Smart City ini tidak menemui hambatan, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berikut ini:

“Sumber daya keuangan sampai saat ini tidak menemui kendala, karena pemimpin sebelumnya, Pak Walikota memprioritaskan kebijaka Smart City di Kota Manado, jadi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Smart City tidak mengalami kekurangan.” (wawancara, 22 Juli 2021).

Sedangkan untuk sumber daya infrastruktur

pendukung terdiri dari berbagai macam infrastruktur seperti perangkat komputer, wi-fi dan lain-lain. Pada sumber daya infrastruktur pendukung ini, Pemkot Manado melakukan pemasangan free wi-fi dan CCTV di area publik yang merupakan sebagian CSR dari beberapa provider telekomunikasi. Infrastruktur IT lain yang telah dibangun diantaranya ruang Cerdas Command Center (C3), Studio Big Data dan kotaku serta infrastuktur IT lainnya.

Dalam pelaksanaan kebijakan Manado Smart City, dilihat dari faktor sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya infrastruktur pendukung sudah cukup baik. Meskipun pada sumber daya manusia mengalami hambatan yaitu kekurangan sumber daya yang menguasai bidang teknologi informasi, namun hambatan tersebut sudah mendapat alternatif pemecahan masalah dengan menerima pegawai non ASN. Sehingga faktor sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Manado Smart City ini dianggap mendukung dan tidak terdapat hambatan maupun permasalahan yang dapat menghambat implementasi kebijakan Manado Smart City.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana memegang unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan Manado Smart City di Kota Manado. Sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik walaupun ditunjang dengan sumber daya yang memadai, namun belum tentu hasilnya sesuai dengan yang diharapkan jika pelaksana atau implementor tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya. Sikap pelaksana pada pelaksanaan kebijakan Manado Smart City ini dilihat dari kedisiplinan dan komitmen dari Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City.

Komitmen implementor ini dilihat dari sikap Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City ini dalam melaksanakan program kegiatan hingga pada kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini guna mengawal dan memastikan program kegiatan dilaksanakan

oleh masing-masing OPD berjalan dengan baik. Selain itu juga untuk memastikan setiap OPD menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berikut ini :

“Biasa dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) tiga bulanan sekali dan diikuti semua OPD. Sesuai dengan SK mengenai pembentukan Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua dan Dinas Komunikasi dan sebagai sekretaris. Kalau ada masalah-masalah yang perlu kita bicarakan dan koordinasikan secara berkala kita mengadakan rapat koordinasi”. (wawancara, 22 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi memiliki peran penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan Manado Smart City. Pada pelaksanaan kebijakan Manado Smart City, disposisi atau sikap pelaksana tidak terdapat masalah yang menjadi penghambat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Manado Smart City memiliki komitmen dan antusias yang tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan Manado Smart City.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan Manado Smart City. Struktur birokrasi erat kaitannya dengan pembagian tugas, wewenang dan hubungan antar divisi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan biasanya dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi implementor dalam melaksanakan kebijakan agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Namun, pada kebijakan Manado Smart City, Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City dalam melaksanakan kebijakan hanya mengacu pada Masterplan Manado Smart City sebagai petunjuk

pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado berikut ini:

“Kami sebagai pihak pelaksana tidak ada SOP khusus, tetapi dalam melaksanakan kebijakan hanya mengacu pada Perda Kota Manado Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peraturan Walikota Manado Nomor 10 Tahun 2018 tentang Manado Smart City, Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2019 tentang Master Plan Manado Smart City, dan Peraturan Walikota Manado Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Sementara untuk struktur birokrasi dan kelembagaan terdiri dari Dewan Smart City, dan Tim Teknis Smart City. Untuk program-program Smart City ada pada renstra OPD masing-masing”. (wawancara, 22 Juli 2021).

Dari keseluruhan hasil evaluasi implementasi kebijakan Smart City Kota Manado membuktikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi menurut teori Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, komunikasi merupakan faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan Manado Smart City. Komunikasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City dengan kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat Kota Manado berjalan kurang baik atau belum optimal. Kelompok sasaran kebijakan seharusnya mendapat prioritas dalam sosialisasi implementasi Kebijakan Manado Smart City. Sedangkan sebagai faktor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan Manado Smart City yaitu sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Manado Smart City, dilihat dari faktor sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya infrastruktur pendukung sudah cukup baik.

Disposisi pada pelaksanaan kebijakan Manado Smart City tidak terdapat permasalahan, Tim Teknis Pengembangan Manado Smart City dalam melaksanakan kebijakan memiliki komitmen dan antusias yang tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan Manado Smart City.

Struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan Manado Smart City dibentuk melalui Keputusan Walikota dengan penjabaran tugas yang jelas dan sesuai dengan bidang serta kewenangan masing-masing OPD. Sehingga tidak terdapat permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan Manado Smart City.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil evaluasi Implementasi kebijakan Smart City di Kota Manado saat ini telah sampai pada tahap monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan. Mengacu pada hasil penelitian, implementasi kebijakan Smart City Kota Manado melalui program kegiatan yang masuk dalam 6 dimensi Smart City, setidaknya ada 36 program kegiatan yang terlaksana belum sesuai dengan indikator keberhasilan. Berdasarkan pada aspek kepatuhan implementor dalam melaksanakan kebijakan Manado Smart City, implementor belum sepenuhnya patuh terhadap Masterplan Manado Smart City sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan.

Dari ke lima program kegiatan pada dimensi Smart Branding yang telah direalisasikan, empat diantaranya yaitu aplikasi Manado 360, fasilitas akses internet di lokasi wisata, e-marketplace untuk koperasi dan UKM, serta portal koperasi dan UKM, sesuai indikator keberhasilan ke-4 program tersebut tidak berhasil dalam implementasi pelaksanaannya. Selain tidak adanya ketersediaan anggaran, ego sektoral lintas OPD

menjadi faktor lain gagal program yang sudah direalisasikan. Sementara, satu program yang memenuhi indikator keberhasilan yakni kegiatan Manado Fiesta. Sehingga, kepatuhan implementor dalam menjalankan program dan kebijakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Pada dimensi Smart Economy telah direalisasikan sebanyak 11 program Smart City, 3 diantaranya tidak berjalan dengan baik sesuai indikator keberhasilan dari program itu sendiri seperti sistem informasi pelayanan dan ketenagakerjaan terintegrasi, sistem aplikasi Zona Penangkapan Ikan (ZPAN), dan pembangunan pasar tradisional yang berdaya saing. Satu program lain yaitu penyusunan konsep dan modul pelatihan akuntansi usaha koperasi setelah peneliti melakukan pengecekan dilapangan ternyata program tersebut belum pernah terealisasi. Sementara, 7 program lain pada dimensi Smart Economy ini berhasil diimplementasikan sesuai dengan indikator keberhasilan masing-masing program. Dengan begitu, implementor dalam hal ini cukup patuh pada kebijakan dan program yang telah direncanakan dan dijalankan.

Pada dimensi Smart Environment direalisasikan sebanyak 10 program kegiatan, dengan 4 program diantaranya berhasil dilaksanakan sesuai dengan indikator keberhasilan program. Sementara, 6 program lainnya tidak berhasil dijalankan karena implementasinya tidak sesuai dengan indikator keberhasilan program. Sebab itu, dapat dikatakan kepatuhan implementor dalam melaksanakan program kegiatan belum sepenuhnya patuh pada sasaran dan tujuan dari program yang ditetapkan. Sehingga, pencapaian sasaran program pada dimensi Smart Environment tidak terlalu maksimal.

Pada dimensi Smart Governance, telah direalisasikan sebanyak 20 program kegiatan Smart City. Dari program yang telah dilaksanakan ini, ada 11 program yang diimplementasikan sesuai dengan indikator

keberhasilan. Sementara 9 program lainnya tidak berhasil dijalankan sesuai dengan indikator keberhasilan. Program yang alihfungsikan ke program lain karena adanya edaran/peraturan dari pemerintah ada 2 program yaitu Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) diganti ke SIPD dan sistem elektronik naskah dinas (e-Gol) yang diganti dengan SiMaya (sistem informasi dunia maya). Sehingga, kepatuhan implementor dalam menjalankan program pada dimensi Smart Governance belum sepenuhnya patuh, karena ada 9 program yang tidak berhasil dijalankan sesuai dengan indikator keberhasilan.

Pada dimensi Smart Living program kegiatan yang direalisasikan yaitu 9 program dan hanya 2 program yang berhasil diimplementasikan sesuai dengan indikator keberhasilan. Kedua program tersebut ialah menata kawasan kumuh secara bertahap di 25 lokasi yang ada di kota Manado, dan pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Baru (Manado Aerocity). Sementara ke-7 program lain pada Dimensi Smart Living tidak dijalankan sesuai dengan indikator keberhasilan. Sehingga, dapat dikatakan kepatuhan implementor pada program yang ada dalam dimensi Smart Living tidak patuh, karena dari 9 program hanya 2 program yang berhasil dijalankan sesuai dengan indikator keberhasilan.

Pada dimensi Smart Society telah direalisasikan sebanyak 13 program Smart City sesuai laporan tim teknis. Namun kenyataan dilapangan setelah dilakukan pengecekan, ada satu program yang belum terealisasi sama sekali yaitu program pembangunan rumah singgah untuk gepeng. Jadi dapat dikatakan program yang terealisasi pada dimensi Smart Society baru 12 program. Dari setidaknya 12 program yang benar-benar terealisasi, ada 6 program yang dilaksanakan sesuai dengan indikator keberhasilan. Sementara, ke-6 program lain belum diimplementasikan sesuai dengan

indikator keberhasilan. Dengan begitu, kepatuhan implementor pada dimensi Smart Society belum sepenuhnya patuh. Sehingga menyebabkan sasaran dari dimensi ini tidak tercapai maksimal.

Implementasi kebijakan Manado Smart City juga telah dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor yang berpengaruh menurut teori implementasi Edward III terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada implementasi kebijakan Manado Smart City, komunikasi menjadi faktor penghambat. Pada aspek komunikasi masih belum terlaksana dengan optimal karena masyarakat Kota Manado sebagai kelompok sasaran kebijakan masih banyak yang belum tahu mengenai adanya kebijakan Manado Smart City. Sedangkan untuk sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor pendorong pelaksanaan Kebijakan Manado Smart City.

Implementasi kebijakan Manado Smart City juga telah dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut teori implementasi Edward III terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada implementasi kebijakan Manado Smart City, komunikasi menjadi faktor penghambat. Sedangkan untuk sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor pendorong pelaksanaan Kebijakan Manado Smart City.

Saran

1. Disarankan kepada implementor agar meningkatkan komunikasi internal dengan tim teknis Smart City. Sebab ada program yang belum direalisasikan sama sekali tapi sudah masuk pada laporan realisasi program Smart City.
2. Disarankan kepada implementor agar lebih mengutamakan sinergitas antar OPD dalam menuntaskan program Smart City. Sehingga tidak ada lagi yang namanya ego sektoral yang berimbas pada kualitas pelayanan publik maupun keberhasilan program

kegiatan smart city itu sendiri.

3. Selain adanya pengaruh pandemi covid-19, disarankan kepada implementor agar lebih memilih proram kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ketimbang merealisasikan program aplikasi yang ternyata tidak dilakukan pemeliharaan yang berkelanjutan.
4. Disarankan bagi implementor kebijakan Manado Smart City untuk meningkatkan komunikasi informal kepada masyarakat Kota Manado tentang program Smart City. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dari level bawah seperti tingkat kelurahan sampai ke komunitas. Sehingga kebijakan Manado Smart City dapat dikenal luas oleh seluruh masyarakat Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kedua. Yogyakarta, Penerbit Gaya Media.
- Mursalim, S.W. (2017). *Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung*. *Jurnal Ilmu Adaministrasi*. Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Vol.14, No,1.
- Suaedi, F & Bintoro, W. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Yogyakarta. Graha Ilmu.